

**SINERGITAS TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (TSP) DAN FORUM *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILIY* (CSR) LAMPUNG DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM CSR**

SKRIPSI

Oleh:
Astri Juniar Wulan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

SINERGITAS TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) DAN FORUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIY* (CSR) LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CSR

**Oleh:
ASTRI JUNIAR WULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sinergitas dan kendala yang dialami antara Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya laporan pelaksanaan program CSR oleh perusahaan yang ada di Provinsi Lampung serta sebagian besar perusahaan dan pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang sama atas CSR yang sesuai dengan definisi utama atau sebagaimana yang dipahami di level global.

Penelitian ini menggunakan teori Eppel (2013) sebagai *framework* dalam analisis data. Eppel mengungkapkan ada 4 faktor mengenai terjadinya sinergitas antara pemerintah dan non pemerintah yaitu : Kebutuhan untuk melibatkan komunitas dalam keputusan-keputusan yang berdampak kepada mereka yang berkaitan dengan pelibatan secara langsung atau tidak langsung ; Kebutuhan untuk memperoleh legitimasi dan nilai efektivitas yang berkaitan dengan sinergitas dalam pelaksanaan program; Secara sosial sifat masalah yang dipecahkan sangat kompleks yang berkaitan dengan pola pemecahan masalah ; Keterbatasan-keterbatasan informasi dan sumber daya yang diperlukan dari masing-masing organisasi yang berkaitan dengan ketergantungan satu instansi dengan instansi lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses sinergitas dalam pelaksanaan program CSR berjalan dengan baik, tetapi masih mengalami berbagai kendala seperti belum adanya kesepahaman mengenai CSR itu sendiri, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program CSR.

Dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan dalam mengatasi beberapa kendala dalam sinergitas pelaksanaan program CSR. Pertama, Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dan Forum CSR Lampung dapat membuat program yang berfokus pada sosialisasi dan edukasi mengenai CSR khususnya untuk perusahaan dan pemerintah. Kedua, perusahaan dan pemerintah dapat bekerjasama dan melibatkan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat untuk optimalisasi program CSR.

Kata kunci : *corporate social responsibility*, sinergitas, *collaborative governance*

ABSTRACT

THE SYNERGY OF TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PRUSAHAN AND FORUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIY (CSR) IN THE IMPLEMENTATION OF CSR PROGRAM

**By:
ASTRI JUNIAR WULAN**

This study try to aim the description how the synergy and constraints experienced by Tim Fasilitasi TSP and Forum CSR Lampung in implementing CSR programs. This research is motivated by the low report of CSR program implementation by companies in Lampung Province and most companies and stakeholders do not have the same understanding of CSR in accordance with the main definition or as understood at the global level.

This study uses Eppel's theory (2013) as a framework for data analysis. Eppel revealed that there are 4 factors regarding the occurrence of synergy between government and non-government, namely: The need to involve the community in decisions that affect them relating to direct or indirect involvement; The need to gain legitimacy and value of effectiveness related to synergy in program implementation; Socially the nature of solved problems is very complex which is related to problem-solving patterns; Limitations of information and resources needed from each organization related to the dependence of one agency with another.

The results of this study indicate that the synergy process in the implementation of CSR programs goes well, but still experiences various obstacles such as the lack of understanding on CSR itself, and the lack of community participation in the implementation of CSR programs.

In this study, several suggestions can be given in overcoming some obstacles in the synergy of implementing CSR programs. First, Tim Fasilitasi TSP and Forum CSR Lampung can create programs that focus on socialization and education on CSR, especially for companies and governments. Second, companies and governments can work together and involve communities in the community to optimize CSR programs.

Keywords: corporate social responsibility, synergy, collaborative governance

**SINERGITAS TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (TSP) DAN FORUM *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILIY* (CSR) LAMPUNG DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM CSR**

Oleh:
Astri Juniar Wulan

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **SINERGITAS TIM FASILITASI TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) DAN
FORUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIY
(CSR) LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM CSR**

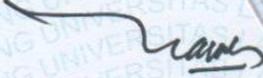
Nama Mahasiswa : **Astri Juniar Wulan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1416041006**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

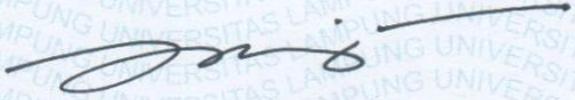
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.
NIP 19630206 198803 1 002


Devi Yulianti, S.A.N., M.A.
NIP 19850705 200812 2 004

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

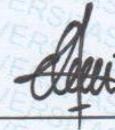
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

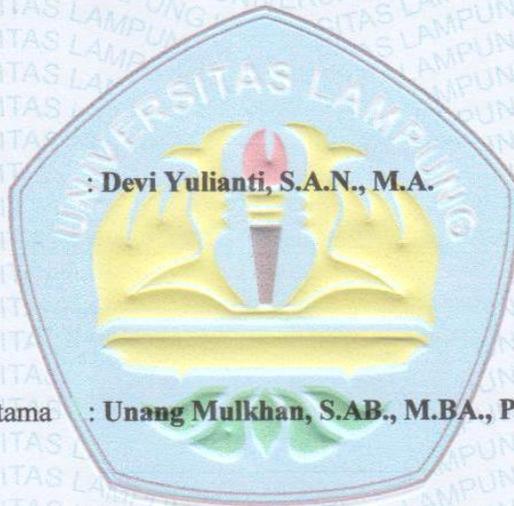
Ketua : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**



Sekretaris : **Devi Yulianti, S.A.N., M.A.**



Penguji Utama : **Unang Mulkhana, S.AB., M.BA., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 September 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 september 2018

Yang membuat pernyataan,



Astri Juniar Wulan
NPM. 1416041006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Astri Juniar Wulan dilahirkan di Lampung Timur, pada 21 Juni 1996, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Alriyadi dan Ibu Arba'atin. Penulis menempuh pendidikan di TK Bina Putra pada tahun 2001-2002. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Cempaka Nuban pada tahun 2002 - 2008, dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Batanghari Nuban Lampung Timur pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Sekolah Menengah Atas dijalani penulis di SMA N 1 Kotagajah Lampung Tengah tahun 2011-2014.

Pada tahun 2014 penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Ujian SNMPTN dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Selama menjadi mahasiswa penulis tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan yaitu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung, Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung dan Ikatan Mahasiswa Lampung Timur. Pada bulan Januari 2017 hingga Februari 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di

Kecamatan Bumi Nabung Desa Bumi Nabung Ilir selama 40 hari, penulis mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena bisa belajar secara langsung dan bisa menerapkan bidang ilmu penulis kepada masyarakat setempat.

MOTTO

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever”

(Mahatma Ghandi)

“Faber Est Suae Quisque Fortunae

(setiap orang adalah perancang masa depannya sendiri)”

(Appius Claudius)

“Aku tidak pernah takut gagal karena saat aku menyertakan ALLAH SWT dalam seluruh hidupku maka aku pasti mendapatkan yang terbaik”

(Astri Juniar Wulan)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan karya ini kepada :

Kedua Orangtuaku

Bapak Alriyadi dan Ibu Arba'atin

yang telah memberikanku kehidupan dan kasih sayang tak terhingga sepanjang masa.

Para pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku hormati.

Adikku Amairoh Mutia Kianza dan Seluruh Keluarga Besar

Kakak, Abang, Mbak dan adik-adikku, Sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan.

Terimakasihku pada kalian semua yang telah memberikan cinta dan kasihnya, memberikan semangat, dukungan, serta motivasi. Terimakasih atas keikhlasan dan ketulusan serta doa yang tak henti-hentinya yang selalu menjadikan kekuatan dan segala kebaikan yang tak bisa terbalaskan.

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah dari Allah SWT Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“SINERGITAS TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) DAN FORUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIY* (CSR) LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CSR”** yang penyajiannya tersusun secara sistematis dan mendalam. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Lampung.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Alriyadi dan Ibu Arba'atin. Sosok tidak tergantikan, panutan, inspirasi dan motivasi ku. Terimakasih telah menjadi orangtua terbaik di dunia ini, terimakasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, dan kekuatan yang selalu bapak ibu berikan. Terimakasih telah membuat

kakak bisa menyelesaikan pendidikan sarjana yang bapak dan ibu tidak jalani. Terimakasih atas segala sesuatu yang tak terhingga yang telah kalian berikan kepadaku. Terimakasih atas kasih sayang yang terus kalian berikan kepadaku sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya. Tidak ada balasan yang dapat menggantikan segalanya kecuali Jannah untuk kalian, *Aamiin*. Semoga suatu saat dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan, Aku bisa menyempurnakan doa, lelah, dan pengorbanan kalian.

2. Bapak Dr. Syarif Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Intan Fitri Meutia, S.AN., MA., Ph.D selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terima kasih atas arahan, motivasi, dan dukungannya selama ini.
5. Bapak Dr. Bambang Utoyo S,M.S.i selaku dosen pembimbing pertama dan pembimbing akademik , terima kasih atas bimbingan, dukungan, bantuan, nasihat, dan motivasi yang bapak berikan selama mengerjakan skripsi sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Devi Yulianti. S.AN., MA. selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih sudah dengan sabar membimbing peneliti, memberikan saran, nasihat dan dukungan yang Ibu berikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Unang Mulkhan, Ph.D. selaku dosen pembahas dan penguji, terima kasih atas arahan, kritik, saran, dan nasihat yang telah bapak berikan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan motivasi selama masa kuliah.
9. Bapak Azhari dan Bapak Johari, selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih telah banyak membantu kelancaran administrasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap informan dan pihak yang membantu penelitian ini, Pak **Iwan Meylani, S.STP, M.Ec.Dev** dari BAPPEDA Provinsi Lampung, Ibu **SAPTARINI** Ketua Forum CSR Lampung, Pak **Billy Sandro Primadita** dari PT Nestle, Pak **Yayan Sopian** dari PT Coca-Cola. **Kak Arga** staff Forum CSR Lampung yang sangat baik dan banyak sekali membantu peneliti. **Kak Wayan** staff BAPPEDA yang sangat baik dan banyak membantu, mengarahkan serta memotivasi peneliti. Terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamanya.
11. Teman-Teman baik ku yang baik dalam arti kata sebenarnya. Terimakasih sudah menemani empat tahunku yang dengan kalian masa kuliahku berwarna cerah. **Ara** (si perfectionis, keras kepala, penyayang, penasehat, pendamping saat senang dan susah. Ra hidup ini bukan hanya tentang melawan dan menantang matahari, di titik tertentu kamu harus merasakan jatuh dan tersungkur mengakui kehebatan matahari. But It's okee thats life). **Nur** (si pendiam, pemalu dan penurut. Nur menjadi nakal itu kadang juga perlu. Biar hidup gak lurus aja wkwkwk). **Ni'mah** (Sang ahli sejarah, periang, tukang selfie, pejuang aspal. Nik waktu memang tidak bisa di ulang, kamu tidak bisa memperbaiki masa mudamu yang habis Cuma buat belajar itu. Tapi kamu masih bisa meneruskan hidup melakukan apapun yang belum pernah kamu

lakukan. Sekali lagi menjadi tidak baik itu kadang juga perlu wkwkwk). **Gusty** (si gesit kalo diajak main, bundahara, royal dan tidak pemaah. Gus hidup itu butuh target, butuh rencana untuk kedepan. Sekali waktu kamu harus keras pada dirimu sendiri). **Okta** (si cerewet, penuh gelora dan gesit. Ta hidup ini bukan hanya tentang melangkah dan maju, hidup ini juga butuh mampir untuk paham artinya). **Rani** (si manis yang menyek-menyek, berwajah tenang tapi gupekan. Ran satu ditambah satu itu bukan hanya dua, bisa jadi empat atau sepuluh. Begitulah hidup ran). **Devi** (si cerewet, gupekan, pemberani dan baik hati. Dev tidak apa-apa menjadi berbeda, pilihanmu jelas akan menentukan hidupmu).

12. Teman-teman baik ku, terimakasih sudah menemani empat tahunku yang dengan kalian masa kuliahku berwarna sempurna dan lengkap. **Binter adensyah** (si pemaah, pelindung, pengayom, penasehat, patner in crazy things, pengalah dan sometimes paling pengertian. Bang menanggung bahwa kamu punya banyak waktu itu salah, selesaikan satu lalu mulai lagi yang lain. Selesai satu perjuangan maka mulai lagi perjuangan yang lain). **Ana-bel** (si panjang kaki, tukang gupek, diajak kuy selalu ayok, pelawak pribadiku, wanita penghiburku. Na kalo gak bisa jadi cantik ya harus bisa jadi pinter, banyak pilihan untuk jadi wanita sempurna. just be perfect as you can). **Cisca** (si galak, biang tawa, penebar keceriaan, penghibur laraku, squishy gemasku. Sis hidup ini sulit bukan untuk membuatmu kerdil, semakin sulit semakin kamu harus kuat. Tidak ada pilihan lain selain terus berjuang dan jadilah sukses). **Mia** (roomate, wanita pertama ku di kampus, teman berdebat, si perhatian dan baik hati. Terus lah berjuang mi, ambisimu perlu banyak

pencapaian). **Rianik** (si tukang ngakak, baik hati, bucin, supir travel andalankuh wkwk. Hidup emang punya dramanya masing-masing nik, nikmat dan syukuri). **Musdalifah** (adik kecil yang mengisi hari-hariku dengan ketidakberfaedahan, aku bahagia bersamamu, suaru tidak merdumu yang selalu mengantarkan ku pada lelap, terimakasih dek mus. Semoga kebahagiaan selalu bersamamu). **Suci Latipeh** (si kecil padahal tua, lincah, baik hati, pintar bikin sambel ijo yang selalu aku kangenin. Terus jalani apa yang kamu yakini peh, jangan banyak drama cinta yaa wkwk). **Desy** (si kecil ngaku Tuhan, tukang ngoceh, banyak tingkah, perhatian, ter-siap sedia. Hidup ini emang banyak lika-likunya ya des, semoga kuat selalu). **Adi Kur** (si cungring, dewasa, terimakasih sudah menjadi teman yang menghibur wkwk). **Sangga Otan Alay** (si gaje, tapi gak pance, dulu paling bias di andalkan sekarang dia bucin). **Nuridin** (si gak jelas, gak pernah rapi, ngeselin, patner debat wkwk). **Isti** (alias kokom, si bolot, lemot, tapi urusan cinta pakar banget, cantic kayak putri arab, pintar masak sekarang. Kom semoga segera di pertemukan dengan cinta yang baik yaa). **Hiro** (patner presidium, temen debat ngurus himagara). **Triaz** (si lolak, telat ketawa, baik hati, tempat minep, bubur umi terbaik yas wkwk). **Trias** (Ini dosen 5 sks, maaf ya aku jadi siswa kurang cepet berkembangnya wkwkwk). **Bella** (si besar, paling pas diajak ngomong dewasa, mamah dedeh versi buruk wkwkwk. Semoga di semakin lancar karir korea-an dan brondong juga).

13. Kakak pembimbing skripsiku, Mbak eka yang galak dan baik hati. Terimakasih sudah menuntun dan mengarahkan skripsiku, terimakasih sudah sabar dan bersedia selalu mengingatkanku. Semoga sukses selalu mbak.

14. Keluarga KKN Bumi Nabung ilir, Bapak dan Ibu didik serta Bapak dan Ibu Par terimakasih sudah menjadi orangtua angkat selama KKN. Mba rindi dan Candra, terimakasih sudah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, Nani si kecil, baik hati, perhatian, temen makan dan tidur 40 hari, Ebti, Candra, Fajar, Kak Bembi, Amir kalian membuat KKN ku berkesan sekali wkwk. Mamat, Kak Agus, Kak Uci, Dina, Tyas, Dalimunte, Bang Michel teman KKN se-desa yang gokil-gokil. Ervan, Agung, Shinta teman KKN kecamatan yang gokil sekali.
15. Keluarga Himagara yang mengajarkan aku banyak ilmu organisasi, Mbak novi, Bang bery, Bang denish, Bang rifky, Bang Nadiril, Mbak dwiny, Abang-Mbak 2012, Bang Guruh, Abang-Mbak Senior Himagara. Mbak-Abang angkatan 2013, Bang Pindo, Mbak Uun, Bang Sidik, Mbak Uki, Mbak Rindu, Mbak ghina, Mbak Okke, Mbak Septiya Mbak Defita Bang Leo, Bang Sedy, Bang zulham, Bang Dhimas, Bang Ari Ismarangga, dkk. Adik-adik angkatan 2015-2016, Cindy, Hanif, Nafi, Rizeki dkk, Maya dkk. Semangat selalu untuk kita semua.
16. Teman-teman yang selalu siap sedia, siap *calling* Abang **Beny Rachmansyah** orang gabut yang selalu nasehatin tapi kadang ga jelas wkwk. **Refi, fatra, desriyanto, andra, eka, icul, kak mala, nindy novita sari, bayu, dkk.** Terimakasih atas kebaikan kalian selama ini.
17. Teman-teman yang menemani dari langkahku di sekolah dasar, **Widya Dwi Utami** dan **Angger Deli Asmoro** kalian yang paling setia, menjadi keluarga, teman dan sahabat. Kalian memberiku kekuatan untuk terus maju, selalu sedia

saat aku butuh, memberikan perhatian meski jarang bertemu. Segala yang terbiak ku doakan untuk kalian.

18. *Super Team*, Orang-orang pembuka bab baru dalam hidupku. **Singgih Widiyastono**, terimakasih sudah mengajarkan banyak hal. *You may feel that you don't give me anything. But I feel like receiving many things and learn a lot from you.* **Yustian FM**, Bos merangkap abang, teman curhat dan *sugarbro*. Terimakasih bang yus atas segala kebaikan, ilmu dan pelajaran yang diberikan, terimakasih selalu menantang niat dan usahaku, berkatmu aku semakin kuat. **Erix Ferdi Anwar**, Kak terimakasih sudah sangat sabar mengajari dan membimbingku tanpamu apalah aku. **Heri Purnomo**, Pak heri terimakasih atas kepedulian dan ilmu yang sudah di berikan. **Pak Bowo, Kak Richard, Bang Nando, Kak dika, Mbak Arum, Mbak Tari, Mbak Windy, Mbak Ranca, Mbak Nurul, Kak Ipul, Kak Rangga, Bang Fahmi, Om Galan, Bang Hasan, dan Seluruh Tim CN**. Terimakasih sudah mengajarkan dan memberi kesempatan untuk belajar dan *do real action*, karena kalian masa akhir kuliahku menjadi lebih baik.
19. Keluarga besar **Gelas Antik** (Ana, Mia, Sisca, Daiska, Asih, Heni, Desy, Sari, Riany, Istiqomah, Fazry, Rydho, Trias, Triaz, Tanicha, Adi Black, Babe, Otnay, Adi Kur, Andra, Andriyanto alias boboho, Anggi Lestari, Anggi Setiawan, Annisa Yurida, Annisa Utami, Vita, Arif, Arizal, Bella, Binter, Deni, Dian, Dinda, Dira, Ditho, Anung, Ely, Adon, Fadly, Faiz, Fatra, Fatwa, Ferdian, Ferry, Gusty, Herwan, Hiro, Holil, Idris, Istie R, Intan, Rian, Thiza, Julian, Reza, Nana, Ranyi, Meli, Mia, Fazry, Ma'ruf, Nabila Aisyah, Nabila Cho, Nadya, Nihan, Niza, Fungsi, Nur Arifah, Hasan, Idin, Ela, Oci, Refi,

Regi, Rifki, Robi, Rydho, Pranitha, Sandi, Sangga, Satria, Sintong, Sondang, Tengku, Tiyasz, Yunia, Wahyu Hidayat, Wahyu Syawaldi, Widi, Yumas dan Alvin). Serta keluarga besar Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik lainnya. Terimakasih untuk kebersamaannya dan kekompakan selama dibangku perkuliahan, terimakasih untuk doa, semangat, uluran tangan kalian selama ini. *See u guys on top!*

20. Teman-teman KMB X BEM U KBM UNILA, Staff Sospol BEM U KBM UNILA MUDA BERGERAK, teman-teman IKAM LAMTIM, Sahabat KESMA, Teman-teman P dan K. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman organisasi yang sudah di berikan.
21. Orang-orang yang sangat berarti dalam mengajarkan dan memberikan pelajaran hidup. Karna kalian aku mengerti bahwa setiap step sakit, pedih dan luka dalam hidup ini harus di lewati. Tidak pernah ada sesal aku hanya bersyukur belajar banyak hal. Meski tak dapat menyebutkan nama kalian sama berartinya dengan yang lain. Terimakasih banyak.
22. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas segala bentuk bantuannya.

Skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti. Apabila masih terdapat kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian lanjutan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 25 September 2018
Peneliti,

Astri Juniar Wulan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang CSR.....	11
B. Tinjauan Tentang <i>Governance</i>	18
C. Tinjauan Tentang <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	24
D. Tinjauan tentang <i>Stackeholder</i>	31
E. Kerangka Pikir.....	33
III. METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	42
F. Teknik Keabsahan Data.....	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum	47
1. Gambaran Umum BAPPEDA Provinsi Lampung	47
2. Gambaran Umum Forum CSR Lampung	53
3. Gambaran Umum PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Region Lampung	55
4. Gambaran Umum PT. Nestle Indonesia Panjang Factory.....	56

B. Hasil	60
1. Sinergitas Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR	60
2. Kendala sinergitas antara Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR	73
C. Pembahasan.....	75
1. Sinergitas Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dan Forum CSR Lampung dalam Pelaksanaan Program CSR	75
2. Kendala sinergitas antara Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR	88
3. Matrik Hasil Penelitian.....	91
V. KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Peran dan Posisi <i>Stakeholder</i> CSR	3
2. Daftar Informan.....	40
3. Matrik Hasil Penelitian	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	35
2. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman	44
3. Foto Rapat Koordinasi di Kantor BAPPEDA	62
4. FGD Kelompok kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	63
5. Kegiatan CSR “Pahawang Sejuta Warna” 22-23 mei 2017	66
6. Diskusi mengenai Pariwisata Lampung bersama Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, BAPPEDA, FGMA, FHRI di sekretariat Bersama Forum CSR lampung	68
7. Pembahasan LSA di PT NESTLE Indonesia Pabrik Panjang.....	69
8. Blue Book	71

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti: memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat, membayar pajak, memberi sumbangan, dan lain-lain. Tetapi keberadaan perusahaan ternyata juga menimbulkan banyak masalah sosial dan lingkungan, seperti: polusi udara dan air, radiasi, hujan asam, limbah kimia, keracunan, kebisingan, diskriminasi, kesewenang-wenangan dalam eksploitasi sumber daya alam yang ada. Hal ini dapat menyebabkan *stress* mental dan kerugian fisik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perilaku eksploratif yang ditunjukkan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan kurangnya tanggung jawab terhadap lingkungan (fisik dan sosial) telah mengancam keberlanjutan ketersediaan bahan baku dan energi, serta memicu disharmonisasi dan konflik sosial dengan masyarakat lingkungannya. Hal tersebut banyak menimbulkan kritik publik diberbagai dunia. Menanggapi hal tersebut, banyak perusahaan yang telah bereaksi dan mulai melaksanakan konsep *corporate social responsibility* (CSR).

Konsep CSR ini muncul pertama kali pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Namun teori mengenai CSR baru muncul tahun 1953 yaitu dengan diterbitkannya buku "*social responsibility of businnesman*" karya Howard R. Bowen yang

selanjutnya dikenal sebagai “Bapak CSR”. Pada awal kemunculannya, Bowen (1953) menyatakan CSR yaitu pengusaha bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka yang harus dicakup dalam laporan laba rugi mereka. Pada saat itu 93,5% dari pelaku bisnis di Amerika Serikat setuju dengan pernyataan tersebut. (Mardikanto, 2014 : 98)

Konsep CSR terus berkembang dari waktu ke waktu, secara teoritis CSR merupakan salah satu bagian dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan *shareholder*). Jadi CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (*stakeholders*) daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, komunitas, masyarakat, investor, pemerintah dan pemasok serta kompetitornya sendiri. (Azherly, 2012 : 5).

Berikut ini adalah data berupa tabel tentang peran dan posisi *stakeholders* CSR.

Tabel 1. Peran Dan Posisi *Stakeholder* CSR

No.	<i>Stakeholder</i>	Peranan <i>stakeholder</i>	Posisi
1	Perusahaan	Pelaku Usaha	1. <i>Shareholder</i> 2. Karyawan 3. <i>Vendor/ supplier</i>
2	Masyarakat	Sasaran utama program	1. Konsumen 2. Non-konsumen 3. LSM
3	Pemerintah	Regulator, Pengelola dan Penanggungjawab Pembangunan	1. Instansi Pusat 2. Instansi Daerah

Sumber : diolah oleh penulis 2017

Dari tabel satu di atas dapat dilihat bahwa ada 3 *Stakeholder* dalam CSR, yang pertama adalah perusahaan sebagai pelaku usaha yang terdiri dari *Shareholder*, merupakan sebutan lain untuk pemegang saham, prioritas utama perusahaan adalah menciptakan laba sebesar-besarnya bagi pemegang saham. Selanjutnya adalah karyawan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karyawan merupakan orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah). Terakhir adalah vendor atau *supplier* yaitu para pemasok barang barang yang dibutuhkan sebagai bahan baku dalam proses produksi perusahaan. *Stakeholder* yang kedua yaitu masyarakat yang di dalam terdiri dari konsumen, non-konsumen dan LSM. Masyarakat merupakan sasaran utama dari adanya CSR, sehingga program yang ada adalah program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. LSM memiliki kepekaan yang tinggi terhadap isu sosial seperti isu kerusakan lingkungan hidup, serapan tenaga kerja dan pekerja anak. Kedudukan LSM dalam konteks CSR dibutuhkan tidak hanya untuk mengontrol implementasi CSR tetapi juga bersama-sama

membangun masyarakat di areal operasi perusahaan. *Stakeholder* yang ketiga yaitu pemerintah yang dalam hal ini terbagi menjadi instansi pusat dan instansi daerah. Posisi pemerintah terhadap implementasi CSR berkaitan erat dengan kedudukan pemerintah yaitu sebagai pemilik kewenangan mengatur atau regulator serta sebagai pengelola dan penanggungjawab pembangunan, *leader*, inisiator atau dinamisiator pembangunan.

Kepedulian perusahaan terlihat dari komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan segala dampak dari aktivitas usahanya dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. CSR sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan” (PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

The World Bussiness Council for Sustainable Development (WBCSD) menekankan bahwa perusahaan harus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerjasama dengan karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan melalui CSR.

Melihat perkembangan CSR di dunia usaha, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan menormakan CSR yang semula didasari atas etika bisnis yang sarat dengan nilai-nilai moral, dijadikan sebagai norma hukum yang dituangkan kedalam produk peraturan perundang-undangan. Yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang BUMN
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05Mbu/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Dalam pelaksanaan CSR pemerintah daerah mengambil peran besar dalam mensinergikan setiap program CSR perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menuangkan kebijakan CSR ini didalam Peraturan Daerah (PERDA) yaitu PERDA Lampung No. 20 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam PERDA Lampung No. 20 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pasal 11 ayat 10 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan program CSR perusahaan wajib untuk memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program CSR. Artinya perusahaan dan pemerintah daerah harus

bersinergi dalam melaksanakan CSR untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Provinsi Lampung memiliki berbagai potensi sumberdaya yang cukup menarik untuk terciptanya peluang usaha, sehingga banyak perusahaan yang tertarik untuk mendirikan perusahaan di Provinsi Lampung. Menurut data yang dihimpun dari Publikasi BPS Provinsi Lampung “Lampung Dalam Angka 2017” Ada total 284 perusahaan yang berada di Provinsi Lampung, menurut klasifikasi industri. Perusahaan bidang makanan menempati posisi tertinggi yaitu 190 perusahaan berdiri di wilayah Provinsi Lampung. Lalu ada 42 perusahaan yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Seperti perusahaan batubara, penggalian logam dan pengolahan karet. Dari observasi yang dilakukan peneliti dilapangan tidak di temukan data yang mengklasifikasikan perusahaan menurut status hukum perusahaan.

Dari seluruh perusahaan tersebut belum seluruhnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari data yang diperoleh melalui Forum CSR Lampung hingga akhir Juli 2017 baru ada 67 perusahaan yang melaporkan melaksanakan program (CSR). Baru 23% dari total perusahaan yang melaporkan melaksanakan program CSR. Jumlah tersebut sangat jauh dari jumlah perusahaan yang ada di Provinsi Lampung. Padahal secara tegas Tanggung jawab sosial perusahaan telah tertuang dalam Peraturan Daerah Lampung nomor 20 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Berbagai kendala mempengaruhi pelaksanaan program CSR. Banyak perusahaan yang tidak memiliki sumberdaya manusia yang memahami konsep CSR. Selain itu di perusahaan yang ada di Provinsi Lampung juga tidak memiliki bidang khusus yang menangani mengenai CSR. Oleh karena itu didirikanlah sebuah Forum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (SK Gubernur) yang dapat mewadahi perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung. Forum ini disebut Forum CSR Lampung yang dibentuk sebagai wadah koordinasi, fasilitasi dan konsolidasi para pemangku kepentingan (shareholder, Masyarakat dan Pemerintah). Dengan tujuan mengkoordinasikan, menginisiasi, memfasilitasi, dan mensinergikan potensi pelaku usaha, lembaga sosial, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi CSR di dunia usaha. Sehingga tercapai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Forum CSR Lampung dibentuk dan dilantik berdasarkan SK Gubernur nomor G/190/II.02/HK/2016. Forum pelaksana CSR ini juga diatur dalam PERDA Lampung nomor 20 tahun 2012 pasal 14 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) dapat membentuk forum pelaksana agar program-program TSP terencana dan terlaksana secara terpadu harmonis dan efisien.

Sebelum melantik Forum CSR Lampung pemerintah telah lebih dulu membentuk Tim Fasilitasi TSP untuk mensinergikan pelaksanaan TSP. Tim tersebut dilantik berdasarkan SK Gubernur tahun 2014 nomor G/ 782/ II.02/ HK/2014. Dalam Peraturan Daerah Lampung nomor 20 tahun 2012 pasal 16 ayat 1-4 menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui tim fasilitasi TSP menyampaikan program skala

prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP Lalu Forum pelaksana TSP menyampaikan rencana, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada pemerintah daerah. Pelaporan pelaksanaan TSP disampaikan setiap enam bulan sekali kepada pemerintah daerah, lalu pemerintah daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

Forum CSR Lampung dan Tim Fasilitasi TSP harus saling berbagi peran dalam pelaksanaan program CSR atau TSP. Dalam hal ini menurut SK Gubernur nomor G/782/II.02/HK/2014 Tim Fasilitasi TSP memiliki tugas pokok untuk mengidentifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik guna disinergikan dengan program TSP lalu mengidentifikasi potensi TSP dan mengakomodasi inisiatif dunia usaha tentang usulan program TSP yang dilakukan. Tim fasilitasi TSP juga bertugas melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TSP dan bertanggungjawab dalam monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan TSP.

Forum CSR Lampung menurut SK Gubernur nomor G/190/II.02/HK/2016 memiliki tugas pokok untuk mensosialisasikan berbagai informasi kegiatan anggota forum CSR Lampung dan meneruskannya kepada *stakeholder* terkait, memberikan edukasi publik terkait dengan pemaknaan CSR kepada khalayak (dunia usaha, pemerintah, media dan masyarakat) sehingga tercipta persepsi yang sama serta mendampingi dan menjaga marwah semangat CSR.

Dalam pelaksanaannya banyak tantangan yang harus dihadapi. Sebagian besar perusahaan dan pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang sama

atas CSR yang sesuai dengan definisi utama atau sebagaimana yang dipahami di level global. Hal ini sangat menyulitkan siapapun yang mau menegakkan CSR yang sesuai. Sesungguhnya hal ini bukan saja terjadi di level daerah di Indonesia, dan negara berkembang, namun juga di negara-negara yang lebih maju. Di Indonesia, pemahaman yang beragam sendiri bukanlah sebagai hasil dari pemikiran yang mendalam lalu menghasilkan beragam interpretasi, melainkan lebih karena kepentingan masing-masing pemangku kepentingan.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia sinergi mengandung arti kata gabungan atau kegiatan bersama. Yaitu kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung harus bersinergis untuk dapat mencapai tujuan CSR yang sesuai agar terciptanya CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti sinergitas Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sinergitas antara Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR ?
2. Apa kendala sinergitas antara Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis sinergitas yang terjadi antara Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR.
2. Menganalisis kendala sinergitas antara Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini untuk memperluas wawasan peneliti, dan menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan sinergitas pemerintah dan swasta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah dan Perusahaan untuk meningkatkan sinerginya dalam melaksanakan program CSR.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang CSR

1. Pengertian CSR

CSR merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial / lingkungan sekitar perusahaan berada. Contoh dari bentuk tanggungjawab itu dapat bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa / fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. (Rachman,dkk. 2011 :16-17)

Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas

hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas. (Hadi, 2012 : 48)

Menurut Mu'man Nuryana, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan. (Azheri, 2012 ;28)

CSR diartikan sebagai sebuah konsep pengintegrasian kepedulian sosial dan lingkungan dalam internal ; yang memiliki tanggungjawab sosial (Utamanya dalam praktik hubungan dengan karyawan, dan terkait dengan isu-isu seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan dan keselamatan, serta manajemen manusia) serta, kepedulian terhadap lingkungan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dalam produksi. (mardikanto, 2014 : 161)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah segenap tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan.

2. Prinsip-prinsip CSR

Komisi Brundtland dalam Mardikanto (2014:164) telah menetapkan prinsip-prinsip CSR yang meliputi :

- a. Prinsip akuntabilitas, utamanya yang terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
- b. Prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan integritas.
- c. Prinsip menghormati kepentingan *stakeholders*, dalam arti harus menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan *stakeholders*.
- d. Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus menerima bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum adalah wajib.
- e. Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional.
- f. Prinsip menghormati hak asasi manusia, dalam arti organisasi harus menghormati hak asasi manusia dan mengakui pentingnya dan universalitas mereka.

Selanjutnya, Norsk Hydro (Dwiyanto:2012) menetapkan 5 (lima) prinsip dasar dari pelaksanaan CSR-nya yang terdiri dari :

- a. Menghormati hak asasi manusia, yang dalam pelaksanaan kegiatan-nya selalu dipandu oleh bakuan hak asasi manusia yang berlaku universal.
- b. Berkontribusi terhadap keberlanjutan melalui pengembangan bisnis yang menguntungkan serta aktif terlibat dengan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk terwujudnya pembangunan ekonomi dan sosial

jangka panjang. Dalam kaitan ini, dalam mengoperasionalkan kegiatan, selalu bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk mendefinisikan peran dan tanggungjawab sosialnya.

- c. Keragaman, dengan tidak melakukan diskriminasi gender, ras, etnik, latar belakang budaya, kelompok sosial, kecacatan, orientasi seksual, status pernikahan, umur, dan pendapat politik. Disamping itu, mengakui nilai nilai intrinsik dari keragaman budaya dalam semua praktik bisnisnya.
- d. Dialog, dalam arti selalu mengembangkan dialog dengan semua pemangku kepentingan, untuk memperoleh manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat setempat. Karna itu, perusahaan akan selalu memperhatikan inisiatif dan masukan yang akan digunakan sebagai bakuan pengembangan layanan dan praktik yang bertanggungjawab.
- e. Integritas, dalam arti selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam setiap kesepakatan yang dibangun. Karna itu, tidak akan mengijinkan atau mentolerir segala bentuk korupsi.

3. Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam perspektif teoritik, teori CSR dari Carroll (1979) menjadi rujukan dalam berbagai penelitian mengenai CSR. Pada tahun 1979 Archie B. Carroll (Professor at the University of Georgia) memperkenalkan teori the 'Four-Part Model of Corporate Social Responsibility'. Teori yang dibangun oleh Carroll tersebut meyakini CSR sebagai konsep multi-lapis, yang dapat dibedakan menjadi empat aspek (yang saling berhubungan) yakni tanggung jawab filantropi, etis, hukum dan ekonomi. Keempat aspek

tanggungjawab tersebut diilustrasikan dalam sebuah piramida yang masing-masing tanggung jawab berada dalam sebuah lapisan yang berurutan.



Gambar 9. Piramida Archie B Carrol

Sumber : A. B. Carroll, "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders," *Business Horizons* (July–August 1991): 39–48.

Konsep Model CSR yang ditawarkan oleh Carroll menawarkan adanya empat jenis tanggung jawab perusahaan yakni tanggung jawab ekonomi untuk dapat mendatangkan keuntungan, tanggung jawab hukum untuk mematuhi hukum dari masyarakat yang bersangkutan, tanggungjawab etis untuk melakukan apa yang benar, adil dan wajar, serta tanggung jawab filantropi untuk berkontribusi pada berbagai macam tujuan sosial, pendidikan, rekreasi dan budaya. Seperti telah disampaikan diawal bahwa Keempat aspek tanggungjawab tersebut diilustrasikan dalam sebuah piramida yang masing-masing tanggung jawab berada dalam sebuah lapisan yang berurutan. Berikut ini disajikan priramida CSR yang diperkenalkan oleh Carroll yaitu :

1. Tanggung jawab ekonomi (*Economic responsibility*)

Perusahaan memiliki pemegang saham yang menginginkan imbalan yang wajar atas investasi mereka, mereka memiliki karyawan yang menginginkan pekerjaan yang aman dan dibayar secara adil, mereka memiliki konsumen/pelanggan yang menginginkan produk berkualitas baik dengan harga yang adil dan lain sebagainya. Ini adalah alasan mengapa bisnis berdiri di masyarakat dan dengan demikian tanggung jawab pertama perusahaan adalah menjadi unit ekonomi yang berfungsi dan untuk bertahan dalam usahanya. Lapisan pertama CSR merupakan dasar untuk semua tanggung jawab berikutnya, yang bertumpu pada dasar yang kuat ini (idealnya). Menurut Carroll, kepuasan atas tanggung jawab ekonomi dengan demikian dibutuhkan oleh semua perusahaan.

2. Tanggung Jawab Hukum (*Legal responsibility*)

Tanggung jawab hukum perusahaan menuntut agar bisnis yang dilakukan mematuhi hukum dan 'bermain dengan aturan main'. Hukum dipahami sebagai pandangan moral masyarakat yang dikodifikasikan, dan karena itu mematuhi standar-standar ini merupakan prasyarat yang diperlukan untuk alasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial. Dalam hal tertentu, orang mungkin beranggapan bahwa tanggung jawab hukum sebagai suatu kebenaran, yang harus dipenuhi oleh perusahaan hanya untuk menjaga izin usaha mereka.

Hal yang demikian menurut penulis adalah anggapan yang tidak patut dipertahankan. Tanggung jawab hukum tidaklah tepat apabila dimaknai sekedar untuk menjaga agar izin usaha perusahaan dapat bertahan terus, melainkan sejatinya harus dimaknai sebagai bentuk perwujudan atas ketaatan terhadap pandangan moral masyarakat dimana suatu perusahaan berdiri dan menjalankan kegiatan bisnisnya. Selanjutnya Carroll menegaskan, "*the satisfaction of legal responsibilities is required of all corporations seeking to be socially responsible*" kepuasan tanggung jawab hukum diperlukan dari semua perusahaan yang ingin bertanggung jawab secara sosial.

3. Tanggung jawab etis (*Ethical responsibility*).

Tanggung jawab ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan apa yang benar, adil dan wajar bahkan ketika mereka tidak diharuskan untuk melakukannya oleh kerangka hukum. Carroll berpendapat bahwa *that ethical responsibilities therefore consist of what is generally expected by society, over and above economic and legal expectations*. Dengan demikian menjadi jelas, tanggung jawab etis melahirkan harapan umum yang diharapkan oleh masyarakat, dimana ekspektasi tersebut berada diatas ekspektasi tanggung jawab ekonomi dan hukum.

4. Tanggung Jawab Filantropis

Tanggung jawab filantropis didasarkan pada filosofi "the love of the fellow human" dan dengan didasarkan pada ide bahwa dalam konteks bisnis, menuntut perusahaan untuk mengadakan kebijaksanaan

sebagai usaha meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat setempat dan akhirnya masyarakat secara luas.

CSR dalam hal ini merupakan salah satu wujud dari kebijaksanaan yang diharapkan tersebut dari sudut pandang tanggung jawab filantropis.

B. Tinjauan Tentang *Governance*

1. Pengertian *Governance*

Governance merujuk kepada hubungan antara pemerintah/negara dengan warganya sehingga memungkinkan berbagai kebijakan dan program dapat dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Pergeseran *government* ke *governance* dimaksudkan untuk mendemokratisasi administrasi publik. *Government* menunjuk kepada institusi pemerintah terutama dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan. Sementara itu, *governance* menunjuk kepada keterlibatan *Non Governmental Organization* (NGO), kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat, disamping institusi pemerintah dalam pengelolaan kepentingan umum, terutama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif. (Lubis, 2017:20)

Dalam konsep *governance* pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dalam kebijakan publik maupun dalam hal pelayanan publik. Pemerintah

tidak menjadi pelaksana tunggal birokrasi yang baik namun ada *stakholder* lainnya yaitu sektor swasta dan juga masyarakat. Menurut Dwiyanto (2005:79) *Governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lainnya LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Meskipun perspektif *governance* mengimplikasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, pemerintah sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Syafri (2012: 180) mendefinisikan *governance* sebagai cara dimana pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam masyarakat, menerapkan kewenangan dan mempengaruhi dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan jangka panjang suatu bangsa. Karena tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah berjangka panjang maka dari itu pengupayaan kesejahteraan masyarakat pada negara demokratis perlu untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Terkait dengan pemahaman tersebut Boon dan Geraldine (2012: 181) memaknai *governance* sebagai penentuan berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi ke arah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik lagi. Dengan pemahaman *governance* tersebut, konsep operasional *governance* (tata kelola) adalah cara yang ditempuh pemerintah

suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan bagi pencapaian tujuan negara.

Ada beberapa dimensi penting *governance* menurut Bank Dunia yaitu: (1) kebebasan dan akuntabilitas, perluasan peran serta masyarakat dalam memilih penyelenggara pemerintahan, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers; (2) stabilitas politik dan tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi pergantian pemerintahan lewat kekerasan secara tidak konstitusional atau melalui terorisme; (3) pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas oleh aparatur pemerintahan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang berkualitas; (4) aturan perundang-undangan yang berkualitas, kemampuan pemerintah untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong peran swasta dalam pembangunan; (5) penegakan hukum, meyakinkan berbagai pihak bahwa aturan hukum akan dipatuhi, terutama kontrak-kontrak yang telah disepakati, demikian juga polisi, jaksa dapat menegakkan hukum secara adil; (6) pengendalian atau penghapusan korupsi.

Istilah *public governance* menunjuk pada saling interaksi antara para *stakeholder* dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik (Bovaird & Loffler 2012: 198). *Stakeholder* yang dimaksud adalah masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga politik, media massa, politisi, organisasi nirlaba, kelompok kepentingan, dan sebagainya (Syafri 2012: 198).

2. Teori Eppel dalam *Collaborative Governance*

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Sudarmo 2011: 15)

Fokus dari pada *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para *stakeholder*. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. (Sudarmo 2011: 16)

Menurut O'Leary dan Bingham (2007: 18) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach (2001: 16) yang mendefenisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan *public value* ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

Eppel (2013:4) menjelaskan mengenai alasan terjadinya kolaborasi, yaitu :

“Research suggests that the reasons for collaboration may be conviction about the need to involve the community in decisions that affect them, the need for legitimacy and efficacy of decisions which is gained through wider participation, or the socially complex nature of the problem to be solved and the limitations on information and resources needed for solution within a single organisation.”

Penelitian menunjukkan bahwa alasan untuk berkolaborasi adalah keyakinan tentang perlunya melibatkan masyarakat dalam keputusan yang berdampak pada mereka, kebutuhan akan legitimasi dan efektifitas keputusan yang diperoleh melalui partisipasi yang lebih luas, atau tingkat masalah sosial yang kompleks yang harus dipecahkan dan keterbatasan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan solusi dalam satu organisasi.

Peneliti mengklasifikasikannya dalam empat alasan, yaitu:

1. Kebutuhan untuk melibatkan komunitas dalam keputusan-keputusan yang berdampak kepada mereka

Kebutuhan ini dimaksudkan untuk melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan keputusan-keputusan yang nantinya akan berdampak pada masing-masing pihak. Kebutuhan ini menjelaskan bahwa setiap komunitas dalam suatu kolaborasi memiliki peran dalam membuat, merencanakan dan menjalankan sebuah keputusan.

2. Kebutuhan untuk memperoleh legitimasi dan nilai efektivitas

Efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Sedangkan legitimasi diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin.

3. Secara sosial sifat masalah yang dipecahkan sangat kompleks

Permasalahan sosial merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Masalah ini tentunya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh setiap pihak maka perlu dilakukannya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelesaian masalah ini.

4. Keterbatasan-keterbatasan informasi dan sumber daya yang diperlukan dari masing-masing organisasi

Keterbatasan informasi merupakan sebuah kondisi dimana suatu pihak tidak memiliki akses terhadap info-info yang dia butuhkan. Hal ini

tentu akan menyulitkan setiap pergerakan jika informasi sebagai bahannya saja sulit diakses. Sedangkan keterbatasan sumberdaya berkaitan dengan kebutuhan sumberdaya baik sumberdaya manusia atau sumberdaya pendukung lainnya. Kebutuhan ini tentu dapat dipenuhi dengan bertukar atau saling berkolaborasi.

C. Tinjauan Tentang *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Pengertian GCG

GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input, output, proses*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. (Zarkasyi, 2008 :16)

2. Prinsip dasar GCG

Zarkasy (2008) menyebutkan GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai

pengguna produk dan jasa usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar :

- Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*)
- Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
- Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggungjawab

Selanjutnya, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan.

Asas GCG yaitu :

- Transparansi

Prinsip dasar ; untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Pedoman pokok pelaksanaan ; (1) perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, (2) informasi yang harus diungkapkan

meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, (3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mempengaruhi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi, (4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

- Akuntabilitas

Prinsip Dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan

dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, (2) perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG, (3) perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. (4) perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). (5) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

- **Responsibilitas**

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepastian terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*); (2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan

kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

- Independensi

Prinsip Dasar, untuk melaksanakan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. (2) masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

- Kesetaraan dan Kewajaran

Prinsip Dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan internal yang efektif,

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan

serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kehidupan masing-masing; (2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan; (3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan konflik fisik.

3. Hubungan Antara GCG, *Post- New Public Management* (NPM) dan CSR

Dalam konsep *governance* pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dalam kebijakan publik maupun dalam hal pelayanan publik. Pemerintah tidak menjadi pelaksana tunggal birokrasi yang baik namun ada *stakeholder* lainnya yaitu sektor swasta dan juga masyarakat. Menurut Dwiyanto (2005:79) *Governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain yakni LSM, perusahaan swasta maupun warga negara.

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input, output, proses*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*Stakeholder*). Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan,

yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa usaha. Maka dari itu pelaksanaan CSR menggunakan pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan.

Teori-teori diatas menitikberatkan pada keterlibatan banyak *stakeholders* ini juga terjadi karena adanya implikasi dari reformasi administrasi publik yang memusatkan perhatian pada prinsip *reinventing governance* atau *new public management*, pemerintah disarankan untuk melibatkan sektor swasta dalam pelaksanaan urusan pemerintah. Termasuk dalam urusan pembangunan seperti konsep besar CSR yaitu pembangunan berkelanjutan. *New Public Management* (NPM) secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Seiring perkembangan konsep NPM juga mengalami perkembangan. Terdapat teori *post-NPM*, Tujuan utama reformasi *post-NPM* adalah secara bertahap menangkal disintegrasi atau fragmentasi yang terjadi di bawah NPM dan untuk memulihkan organisasi sektor publik ke situasi integrasi dan koordinasi yang lebih besar. Ini terkait erat dengan pengembangan ukuran tata kelola dalam sistem administrasi politik modern. Gagasan bahwa

bekerja lintas batas organisasi akan memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih efisien dan / atau efektif dan implementasi dan penyampaian layanan bertentangan dengan klaim NPM bahwa efisiensi yang lebih besar dapat dicapai melalui pengaturan yang lebih terfragmentasi dan peran dan fungsi yang lebih jelas untuk unit administratif. Dimensi horizontal pasca-NPM dianggap bahkan lebih penting daripada yang vertikal. (Tom Christensen, 2012:4-5)

D. Tinjauan Tentang *Stakeholders*

Menurut Freeman (2008:69) pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan dari atau kerugian oleh, dan yang hak-haknya dilanggar atau dihargai oleh, tindakan korporasi. Yang termasuk pemangku kepentingan adalah para pemegang saham itu sendiri, para kreditor, pekerja atau buruh, para pelanggan, pemasok, dan masyarakat atau komunitas pada umumnya. Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang menuntut dia harus mempertimbangkan semua kepentingan pelbagai pihak yang terkena pengaruh dari tindakannya. Acuan pertimbangan para manajer dalam mengambil keputusan dan tindakan bukan semata-mata para pemegang saham, melainkan juga pihak lain mana pun yang terkena pengaruhnya.

Para pemangku kepentingan merupakan konstituen yang memiliki "taruhan" (*stake*) dalam operasi sebuah perusahaan. Taruhan itu berupa kemungkinan keuntungan yang semakin besar atau semakin kecil, atau kerugian yang

semakin besar atau semakin kecil. Para pemangku kepentingan yang terkait secara suka rela dengan sebuah perusahaan dan berkontribusi secara langsung, seperti investor, buruh/karyawan, pelanggan, mitra pasar, mengharapkan akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari hubungan tersebut. Sebaliknya, di pihak lain, pemangku kepentingan yang terkait tidak secara suka rela khususnya mereka yang mungkin terkena dampak negatif oleh hal-hal seperti polusi, prinsip utamanya adalah pengurangan atau penghindaran kerusakan dan/atau menghalangi keuntungan.

Pemangku kepentingan ada yang bersifat primer, yaitu pihak yang tanpanya perusahaan tidak dapat berjalan, misalnya pemegang saham, investor, pegawai, pelanggan, pemasok, juga pemerintah dan komunitas yang menentukan regulasi dan pasar. Pemangku kepentingan yang bersifat sekunder adalah pihak yang mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh, perusahaan tetapi tidak terlibat dalam transaksi dengan korporasi dan tidak bersifat esensial bagi keberlangsungan perusahaan. Yang menjadi masalah dengan teori pemangku kepentingan adalah soal pemangku kepentingan yang “bisu” (*mute*) seperti lingkungan hidup dan pemangku kepentingan yang “tidak hadir” seperti generasi masa depan atau korban-korban yang potensial. (Riyadi, 2008:70)

E. Kerangka Pikir

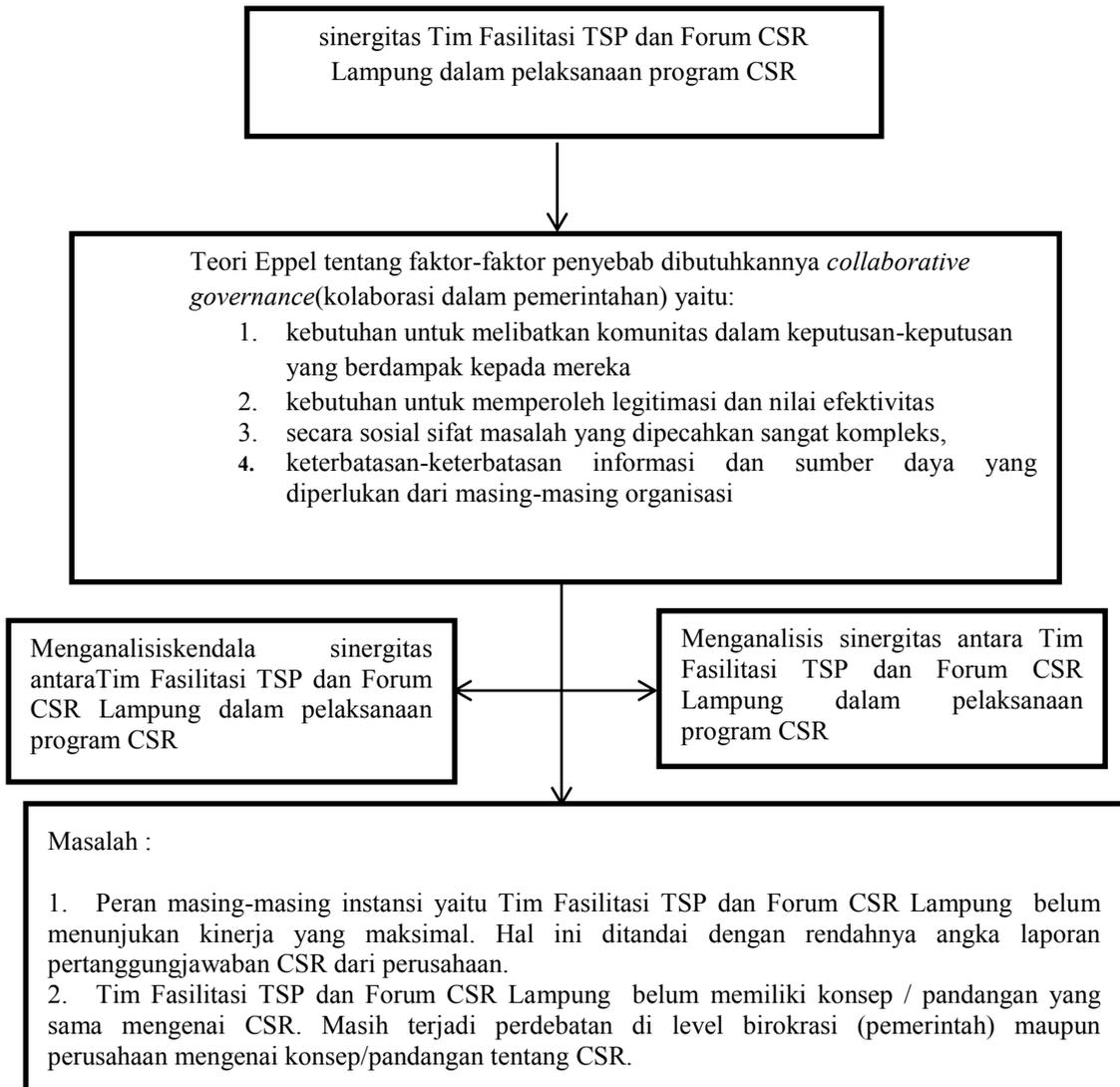
Penelitian ini dilakukan atas beberapa masalah yang terjadi dilapangan yaitu Peran masing-masing instansi belum menunjukkan kinerja yang maksimal di lahit dari presentase jumlah pelaporan program CSR yang di laksanakan perusahaan. Masing-masing instansi *pun* belum memiliki konsep/pandangan yang sama mengenai CSR, seperti dikutip melalui portal berita saibumi.com ketua forum CSR Lampung menjelaskan bahwa CSR bukan bagi-bagi dana tetapi sebuah aspek dalam perusahaan yang menyangkut ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut hasil *pra-riiset* peneliti yang dilakukan di kantor BAPPEDA Lampung pada september 2017 di dapatkan hasil bahwa belum adanya kesepahaman yang sama mengenai konsep CSR antara perusahaan, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

Sinergitas antara Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung menurut teori Eppel berdasarkan beberapa alasan, yaitu kebutuhan untuk melibatkan komunitas dalam keputusan-keputusan yang berdampak kepada mereka, kebutuhan untuk memperoleh legitimasi dan nilai efektivitas, secara sosial sifat masalah yang dipecahkan sangat kompleks, dan keterbatasan-keterbatasan informasi dan sumber daya yang diperlukan dari masing-masing organisasi.

Tujuan dari penelitain ini adalah menemukan sinergitas Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR serta menemukan kendala sinergitas Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR. Hasil akhir dari penelitian ini, diharapkan

dapat memberikan antara lain: (1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu administrasi negara serta sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. (2) Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Lampung baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program CSR. (3) Memberikan masukan kepada Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam upaya mewujudkan sinergitas pembangunan daerah.

Secara umum kerangka pikir penelitian yang hendak dibangun dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber : diolah peneliti 2017

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Tresiana (2013:5) Deskriptif kualitatif merupakan tipe penelitian yang belum sepenuhnya kualitatif dan masih banyak dipengaruhi oleh pandangan deduktif-kuantitatif. Umumnya penelitian deskriptif-kualitatif ini berupaya agar pembahasan cenderung kualitatif, dengan mendekati makna dan ketajaman analisis-logis dan juga menjauhi statistik. Maka deskriptif kualitatif diterima sebagai salah satu tipe penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:8) metode kualitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dikarenakan peneliti menggambarkan sinergitas antara Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR. Tipe penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan hubungan antara pemerintah dan swasta dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tipe penelitian ini juga digunakan untuk menggambarkan sinergitas pemerintah dan swasta secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan. Data yang diperoleh diolah dan juga dianalisis secara induktif untuk menghasilkan sebuah informasi yang relevan mengenai sinergitas Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007:97) fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data akan lebih spesifik. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori *collaborative governance* dari Eppel (2013:4), dengan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kolaborasi dalam pelaksanaan pemerintahan antara lain:

1. Kebutuhan untuk melibatkan komunitas dalam keputusan-keputusan yang berdampak kepada mereka.

Tim Fasilitasi TSP yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas pokok mensinergikan program BAPPEDA dan program CSR yang dilakukan perusahaan agar sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu dibutuhkan pelibatan pihak-pihak yang terkait agar keputusan yang dibuat nantinya akan sesuai. Pelibatan ini dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data yang relevan, pemilihan alternatif dan yang terakhir pengambilan keputusan.

2. Kebutuhan untuk memperoleh legitimasi dan nilai efektivitas.

Kebutuhan ini dimaksudkan untuk memperoleh kepercayaan dan diterima dengan baik oleh masyarakat dalam implementasi program. Program akan lebih efektif jika dijalankan bersama karena sumberdaya yang ada lebih besar. Nilai efektifitas di ukur dengan sejauh tujuan dapat dicapai dilihat dari kuantitas, kualitas dan waktu.

3. Secara sosial sifat masalah yang dipecahkan sangat kompleks.

Permasalahan yang terjadi dan menghambat terlaksananya Program CSR di Provinsi Lampung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Daerah oleh karena itu Tim fasilitasi TSP berkolaborasi dengan Forum CSR Lampung. Dan/atau permasalahan yang di hadapi perusahaan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perusahaan sehingga melalui Forum CSR Lampung dilakukan kolaborasi dengan Tim Fasilitasi TSP. Kolaborasi dalam pemecahan masalah ini meliputi beberapa tahap yaitu identifikasi masalah, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi dan peninjauan kembali pada masalah.

4. Keterbatasan-keterbatasan informasi dan sumber daya yang diperlukan dari masing-masing organisasi.

Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan berbagai informasi dari perusahaan untuk mengetahui program-program CSR yang dilaksanakan

untuk mensinergikan dengan program Pemerintah Daerah. Sedangkan Perusahaan membutuhkan Informasi dari Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan program CSR yang akan dilaksanakan dengan program Pembangunan daerah. Untuk itu agar setiap pihak dapat mendapatkan informasi yang akurat perlu dilakukan sinergitas antara kedua belah pihak.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007: 128) penentuan lokasi penelitian merupakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu, geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di :

1. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tim Fasilitasi TSP berkedudukan di kantor BAPPEDA Provinsi Lampung.
2. Sekertariat Forum CSR Lampung yang terletak di Jalan Pangeran tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung.
3. Perusahaan yang melaksanakan CSR di Provinsi Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Wawancara

Esterberg dalam sugiyono (2013:231) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti mengetahui hal-hal dari responden yang telah mendalam. Di bawah ini disajikan tabel informan yang menjadi responden.

Tabel 2. Daftar Informan

No.	Informan	Keterangan	Nama	Posisi
1.	Forum CSR Lampung	Mengetahui Peran, Program, dan Pola koordinasi yang digunakan dalam sinergitasnya dengan Tim Fasilitasi TSP	Dr. V. Saptarini S.H, M.M	Ketua Forum CSR Lampung
2.	Tim Fasilitasi TSP	Mengetahui Peran dan Tugas, Program serta langkah-langkah strategis dalam mewujudkan sinergitas antara forum CSR dan Tim Fasilitasi TSP.	Iwan Meylani	Kasubbid Pariwisata, industri dan perdagangan
3.	Perusahaan	Mengetahui pelaksanaan CSR Perusahaan yang tergabung dalam forum CSR	Yayan Sopyan	
4.	Perusahaan yang mendapatkan penghargaan CSR terbaik	Mengetahui Program dan implementasinya dari pemenang CSR Award 2016 dan CSR Award 2017	Billy Sandro Primandita	External Relation & CSV Champion

Sumber. Diolah oleh Penulis 2017

Pemilihan informan tersebut berdasarkan posisi dalam organisasi dan kemampuannya dalam isu CSR serta merupakan pihak-pihak yang berperan langsung dalam urusan CSR pada organisasinya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan utama dalam proses penelitian yang berfungsi menerangkan peristiwa-peristiwa yang dilakukan dalam penelitian. Dokumentasi tersebut dapat berwujud tulisan seperti peraturan dan kebijakan, gambar berupa foto maupun video, atau rekaman visual berupa suara informan dan peneliti saat melakukan wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan beberapa dokumen. Berupa SK Gubernur mengenai Pembentukan Forum CSR yang berisi peran, fungsi dan susunan pengurus Forum CSR Lampung. Lalu, SK pembentukan Tim Fasilitasi TSP yang berisi peran, fungsi dan susunan pengurus Tim Fasilitasi TSP. Ada juga *blue book* yaitu buku yang berisi *database* mengenai rekomendasi program CSR.

3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang dibutuhkan (tanpa ditentukan terlebih dahulu).

Peneliti melakukan observasi secara langsung yaitu dengan ikut dalam rapat yang diadakan Tim Fasilitasi TSP, lalu acara yang dijalankan bersama berupa penghargaan terhadap perusahaan dengan Program CSR terbaik. Selain itu peneliti juga ikut dalam program CSR yang dilakukan PT Coca Cola Amatil Indonesia.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Emzir (2011: 85) pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan peneliti untuk meningkatkan pemahaman peneliti menyajikan data yang sudah ditemukan kepada orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Emzir (2011: 129) meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam tahapan ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian sinergitas antara Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dan mana yang bukan. Kemudian peneliti memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan sinergitas antara Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, gambar, foto dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami pelaksanaan program ini, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

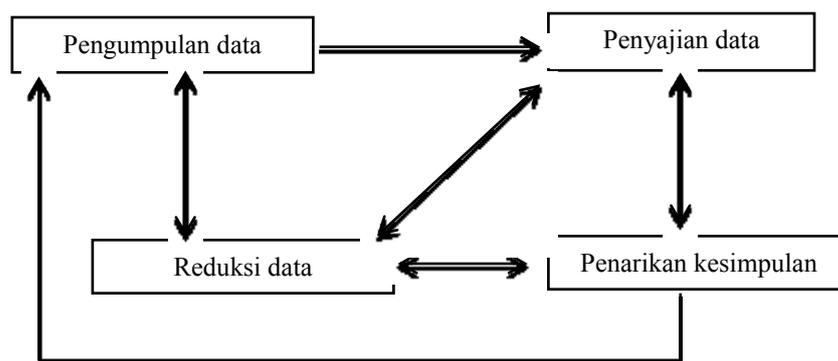
Peneliti menyajikan data berupa bagan, gambar saat observasi dan penelitian, lalu data penunjang dalam bentuk tabel dan uraian singkat. Uraian diberikan dengan jelas untuk mendeskripsikan hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan konsep sinergitas antara Tim

Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dalam pelaksanaan program CSR.

Berikut ini merupakan gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

Sumber: Miles dan Huberman dalam sugiyono (2013: 247)

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

a. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Mathinson dalam Sugiyono (2013:332) nilai dari teknik pengumpulan data dengan

triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan derajat kepercayaan dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Kebergantungan

Menurut Sugiyono (2013: 277) pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak *reliabel* atau *dependable*. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

3. Kepastian

Kepastian data (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau

pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. Dalam hal ini yang melakukan pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dan dianalisis menggunakan teori Eppel (2013), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sinergitas Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung

Dalam penelitian ini ditemukan 3 faktor mendasar yang menjadi alasan terjadinya kolaborasi antara tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung. Faktor pertama yaitu pelibatan komunitas-komunitas dalam pengambilan keputusan, hal ini dibuktikan dengan adanya pelibatan banyak *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Kedua yaitu kebutuhan untuk memperoleh legitimasi dan nilai efektifitas, kebutuhan ini diakui oleh seluruh *stakeholders* yang terkait. Menurut teori Eppel efektifitas dalam pelaksanaan program CSR dianggap semakin tinggi capaiannya ketika melibatkan banyak pihak. Ketiga, yaitu sifat sosial masalah yang dihadapi sangat kompleks, masalah CSR merupakan sebuah isu yang besar sehingga untuk menghadapinya dibutuhkan berbagai pihak untuk saling berupaya menyelesaikan masalah. Sinergitas antara tim Fasilitasi TSP dan

Forum CSR Lampung merupakan salah satu bentuk nyata dari konsep *collaborative governance*.

2. Kendala sinergitas Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung

Dalam sinergitas Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung terdapat beberapa kendala yaitu, masalah kepentingan dan masalah kepercayaan. Dalam *collaborative governance* tidak akan terjadi sebuah kolaborasi jika pihak-pihak yang terlibat tidak saling percaya. Namun dari teori Eppel didapatkan bahwa masalah tersebut justru yang membuat setiap pihak harus berkolaborasi karena pemecahan masalah dapat diselesaikan dengan menyatukan peran setiap *stakeholders*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Tim Fasilitasi TSP dan Forum CSR Lampung dapat membuat program yang fokus pada sosialisasi dan edukasi mengenai CSR khususnya untuk perusahaan dan pemerintah itu sendiri agar pemerintah dan perusahaan sebagai kelompok perencana dan pelaksana memiliki satu pemahaman arus utama CSR. Peneliti menyarankan untuk menggunakan konsep CSR dari Archie B Carroll (2003) mengenai CSR dan konsep piramida CSR yang sudah dijelaskan di tinjauan pustaka. Lalu, secara umum sosialisasi dan edukasi juga harus diberikan kepada masyarakat dan akademii yang didasarkan pada teori Carroll (2003).

2. Tim Fasilitasi TSP dan forum CSR harus bekerjasama atau melibatkan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat untuk optimalisasi program CSR. Kekurangan dalam salah satu program bersama yaitu misalnya dalam program “Pahawang Sejuta Warna” yang diakui kurang berjalan karena tidak melibatkan komunitas kampung dapat dijadikan pelajaran untuk nantinya dapat melibatkan komunitas-komunitas yang ada di daerah tempat diimplementasikannya program. Dalam pelaksanaan program cukup penting melibatkan komunitas-komunitas terkait, selain untuk menarik minat masyarakat juga dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan program.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Azhery, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Rajawali.
- Bappenas. 2008. *Modul Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia*. Jakarta: Bappenas
- Carroll, A. B. 1991. "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders," *Business Horizons*.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Emzir, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Eppel, Elizabeth. 2013. *Collaborative Governance: Framing New Zealand Practice*. New Zeland: School of Government Victoria University of Wellington
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Keban, Yeremis T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta. Gava Media.

- Lubis, Anwar Fuad Alamsyah. 2017. *Collaborative Governance Dalam Program Cerdas (Percepatan Rehabilitasi Dan Apresiasi Terhadap Sekolah) Di Kabupaten Deli Serdang*. Medan : Universitas Sumatera Utara
- Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate Social Responsibility*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Dos Dakarya.
- Oyugi, W.O. 2000. *Good Governance and Local Government*. Tokyo:University Press.
- Rachman, dkk. 2011. *Panduan Lengkap Perencanaan Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Skelcher, C., N. Mathur and M.Smith (2005).The Public Governance of Collaborative Spaces: Discourse, Design and Democracy. *Public Administration*
- Stephens, R. (2000). 'The Social Impact of Reform: Poverty in Aotearoa/New Zealand, *Social Policy and Administration*.
- Streeck, W. and K.Theelen (eds.) (2005). *Beyond Continuity. Institutional Change in Advanced Political Economies*. Oxford: Oxford University Press.
- Sudarmo. 2011. *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Percetakan UNS
- Sudarmo. 2015. *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance (Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima dan Konflik Antar Kelompok)*. Surakarta: Percetakan UNS
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.

- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance*. Bandung : Alfabeta.

Sumber Lainnya

Peraturan Daerah Lampung

Undang-Undang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

SK Gubernur Lampung

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang BUMN

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05Mbu/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

www.lampungbps.go.id diakses pada september 2017

www.coca-cola.co.id diakses pada maret 2018

www.nestle.co.id diakses pada maret 2018

www.forumcsrlampung.blogspot.com diakses pada maret 2018

www.bappeda.lampungprov.go.id diakses pada januari 2018